



Inspektorat Daerah Provinsi Banten

RENJA



Rencana Kerja
Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima - Serang

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 700.05/1368 -Inspektorat/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI BANTEN :

- Menimbang : 1. Bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, perlu disusun secara optimal;
2. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen tersebut pada poin "a" diatas perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana terlampir ;
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis adalah :
1. Menyiapkan dan Mengkompilasi Data dari seluruh Bidang di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
 2. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
 3. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Daerah Provinsi Banten, secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

Plt. INSPEKTUR DAERAH,

The image shows a circular official stamp of the Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan).

Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten

Nomor : 700.05/1368 -Inspektorat/2022

Tanggal : 10 Agustus 2022

Tentang : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

**TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Inspektur Daerah Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat
Daerah Provinsi Banten.

Anggota : 1. Yaneu Septiani, SE., MM.
2. Marissa Ghina Aquarita, SE.
3. Syahrul Firdaus, SKM.
4. Muhammad Revki Iboyma, S.Sos.
5. Rahmawati Nur Fauziah, A.Md., Ak.

Plt. INSPEKTUR DAERAH,



USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Juli 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISA RENJA	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2020	
DAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT	
DAERAH.....	20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS	
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	29
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	32
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN	
KEGIATAN MASYARAKAT.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	42
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA	
PERANGKAT DAERAH.....	42
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	60
BAB V PENUTUP	67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Diteruskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, akan digunakan sebagai dokumen masa transisi sebagai pengganti RPJMD 2017-2022 saat berakhirnya masa Kepala Daerah. Setelah adanya Dokumen RPD 2023-2026 Provinsi Banten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 kedua dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

maka diwajibkan kepada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan dokumen resmi yang disusun Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2023.

Inspektorat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas sebagai perwujudan tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi Banten harus dikelola dan dijaga agar dapat mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Governance* pada Pemerintah Provinsi Banten.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2022 tentang Renstra 2023-2026;
18. Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023–2026 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan. Lebih jauh lagi penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 adalah:

- 1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
- 2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2023 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
- 3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;

- 4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten;
- 5) Memberikan pedoman kepada Inspektorat Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab awal ini akan mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja beserta pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan berisikan penutup Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi bagian pembinaan dan pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan entitas seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat terlihat adanya perbedaan sasaran serta program kegiatan di tahun 2019-2020 dengan program kegiatan di tahun 2021-2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 Provinsi Banten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN										
3	0	2	0	1	Program Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya pelayanan perkantoran	100%	100%		
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%					
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%					
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%					
		Peningkatan Pengelolaan kearsipan dan pelayanan Perpustakaan		100%	100%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang akan mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	100%						
6 0 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang akan mendukung tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1						2	3	4	5	6	7	8=(7 /6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			100%	100%	100%			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	0	2	1	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
						Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Capaian pengawasan internal bidang pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Capaian Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	Persentase Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persentase capaian Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur	Capaian Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengawasan									
60102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Maturitas SPIP						100%	75%	75%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan						100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah						100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah						100%	151%	151%
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten						100%	98%	98%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI						100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						100%	177%	177%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah						100%	200%	200%
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP						100%	100%	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						100%	100%	100%

Terkait dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 pada umumnya realisasi program kegiatan telah tercapai sesuai dengan target penyerapan anggaran maupun target kinerja yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat program kegiatan yang capaiannya tidak 100%.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 dan prakiraan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Realisasi kinerja Tahun 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output)	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	77.92	85	77.92	92%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output)	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Maturitas SPIP	Nilai 4	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 3	75%
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	100%	151%	100%	151%	151%
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	100%	98%	100%	98%	98%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	177%	100%	177%	177%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Keluaran (output)	Target kinerja capaian program Tahun 2021	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021		
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi %
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100%	200%	100%	200%	200%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pendampingan dan Asistensi						

Program prioritas yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfokus pada urusan pengawasan dengan prioritas program pengawasan dibidang internal yang berfokus kepada pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik itu yang berasal dari Inspektorat maupun dari BPK RI, disamping itu Inspektorat daerah Provinsi Banten juga memiliki program yang berfokus kepada pendampingan OPD, peningkatan kapabilitas APIP serta perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan yang terangkum dalam program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Tabel. 2.3 Program Prioritas Perangkat Daerah

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Inspektorat Daerah provinsi Banten tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan hasil realisasinya pada tahun 2021.

Adapun target capaian kinerja sasaran tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator
sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP	Nilai	85	77,92	92%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Level	4	3	75%
		Capaian level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan masih terdapat target kinerja sasaran dengan realisasinya dibawah 100%, terutama pada indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP. Namun demikian jika dilihat dari capaian program dan kegiatan yang menunjang pada capaian target kinerja sasaran tersebut, menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini. Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Banten

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	75	80	85	90	75	87.67	77.92	80	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Nilai Maturitas SPIP	3	3	4	4	3	3	3	3	penilaian dilakukan oleh BPKP
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Level Kapabilitas APIP	3	3	3	4	3	3	3	3	Penilaian dilakukan oleh BPKP
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pendampingan dan Asistensi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten selama Tahun 2021.

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran ke- 1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Nilai 85
Realisasi	:	Nilai 77,92
Capaian	:	92%

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 yang masih menunjukan persentase dibawah 100% lebih disebabkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat efesiensi dalam penyerapan anggaran dikarenakan terkendala dengan kondisi pandemi covid-19 sehingga pada beberapa pos rekening anggaran tidak dapat dilaksanakan;
- Pelaksanaan diklat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kondisi pandemi covid 19, mengakibatkan terdapat beberapa jadwal yang telah ditargetkan tidak tercapai dengan baik sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya.

Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah

Sasaran ke- 2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

IKU pertama yaitu **Capaian Maturitas SPIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Level 4
Realisasi	:	Level 3
Capaian	:	75%

Jika dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukan hasil yang tidak selaras, dimana capaian indikator kinerja program yang

tinggi tidak berpengaruh terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Kondisi tersebut lebih disebabkan pada permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

- a. Perubahan target indikator kinerja capaian sasaran pada saat penetapan RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu capaian maturitas SPIP, dari semula level 3 menjadi level 4;
- b. Data capaian kinerja atas indikator tersebut bersumber dari data eksternal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2019 melalui hasil *Quality Assurance (QA)* atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Banten, sehingga capaian kinerja untuk Tahun 2021 belum dilaksanakan penilaian ulang.
- c. Terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang tidak mendukung pada pencapaian maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang mengakibatkan beberapa aktivitas yang dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap penilaian pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

IKU Kedua yaitu **Level Kapabilitas APIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	: Level 3
Realisasi	: Level 3
Capaian	: 100%

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;
- b. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Banten;

- c. Kompetensi dan integritas para ASN yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- d. Adanya *reward and punishment* bagi ASN, sehingga dapat menimbulkan semangat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;

Alokasi Anggaran

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp.70.364.066.518,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.55.336.902.768,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.15.027.163.750,00. Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 78.64% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 21.36% dari anggaran. Pada Belanja Langsung, anggaran paling besar ada pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan internal dengan persentase 37.77% dari total anggaran Belanja Langsung.

Tabel 2.6
Anggaran Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		55.336.902.768,00
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	54.957.582.768,00
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Bulan	335.850.000,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Bulan	43.470.000,00
B	BELANJA LANGSUNG		15.027.163.750,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.885.793.500,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81.585.000,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52.085.000,00

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 Laporan	6.100.000,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.400.000,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		674.500.000,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	52.000.000,00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	622.500.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.676.859.400,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	98.000.000,00
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	431.068.400,00
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Kegiatan	285.195.000,00
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	232.924.000,00
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	629.672.000,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		537.989.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 Kegiatan	37.989.000,00
	1 Lainnya		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	3 Kegiatan	500.000.000,00
	2 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.463.466.000,00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	641.462.400,00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.822.003.600,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.451.394.100,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	6 Unit	187.410.000,00
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	384.838.000,00
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	131.770.000,00

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	TARGET K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	747.376.100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.549.159.250,00
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		5.676.153.250,00
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	305.300.000,00
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Kegiatan	4.092.381.250,00
	3. Reviu Laporan Kinerja	7 Kegiatan	280.650.000,00
	4. Reviu Laporan Keuangan	12 Kegiatan	570.123.000,00
	5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Kegiatan	427.699.000,00
8	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		873.006.000,00
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Bulan	138.320.000,00
	2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Kegiatan	734.686.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.592.211.000,00
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		512.590.000,00
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan	512.590.000,00
10	Pendampingan dan Asistensi		1.079.621.000,00
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 Kegiatan	662.595.000,00
	2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Kegiatan	45.050.000,00
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	358.276.000,00
	4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	13.700.000,00
JUMLAH			70.364.066.518,00

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai *Quality Assurance* mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mengawal kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
- b. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
- c. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
- d. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
- e. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

- f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
- g. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
- h. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
- i. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
- j. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tabel 2.7
Permasalahan, faktor pendorong dan penghambat Inspektorat

Permasalahan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Belum optimalnya pelaksanaan audit, reviu, pendampingan monitoring dan tindak lanjut	1 <i>Internal Audit Charter</i> (IAC)	1 Kompetensi serta jumlah SDM APIP dan sarana prasarana yang menunjang pemeriksaan belum memadai
Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara	2 <i>Political Will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik di nasional maupun daerah	2 Komitmen OPD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan manajemen risiko masih rendah
Belum Optimalnya Implementasi SAKIP pada OPD	3 Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang strategis	3 Komitmen OPD tentang pemenuhan PMPRB dalam organisasinya masih rendah
Keseriusan OPD masih kurang dalam meningkatkan nilai SAKIP		4 Komitmen APIP dalam peningkatan kapabilitas APIP belum optimal
Belum terimplementasikan nya Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik	4 Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk hukum daerah	5 Komitmen unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas masih sangat rendah
		6 Kurangnya metode pembinaan pengawasan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan serta rancangan awal RKPD Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan RKPD 2022

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Inspektorat Daerah				59,927,967,000	Inspektorat Daerah				59,927,967,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Banten	100	51,052,090,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Banten	100	51,052,090,000	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi Banten	100	259,627,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi Banten	100	259,627,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Banten	6 Dokumen	180,845,000	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Banten	6 Dokumen	180,845,000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	27,600,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	27,600,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Banten	4 Dokumen	51,182,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Banten	4 Dokumen	51,182,000	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Provinsi Banten	100	43,685,820,000	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Provinsi Banten	100	43,685,820,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Banten	14 Bulan	43,297,800,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Banten	14 Bulan	43,297,800,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Banten	12 Dokumen	338,550,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Banten	12 Dokumen	338,550,000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Banten	12 Dokumen	49,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Banten	12 Dokumen	49,470,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Provinsi Banten	100	450,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Provinsi Banten	100	450,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Banten	60 Orang	450,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Banten	60 Orang	450,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Provinsi Banten	100	1,307,195,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Provinsi Banten	100	1,307,195,600	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Dokumen	107,800,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Dokumen	107,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Dokumen	348,781,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Dokumen	348,781,600	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Dokumen	313,714,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Dokumen	313,714,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Banten	12 Dokumen	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Banten	12 Dokumen	350,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Banten	2 Dokumen	186,900,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Banten	2 Dokumen	186,900,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Banten	100	166,516,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Provinsi Banten	100	166,516,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Dokumen	166,516,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Dokumen	166,516,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Provinsi Banten	100	2,648,216,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Provinsi Banten	100	2,648,216,400	
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Bulan	641,462,400	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Bulan	641,462,400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Bulan	2,006,754,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Bulan	2,006,754,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Provinsi Banten	100	2,534,715,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Provinsi Banten	100	2,534,715,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Banten	1 Unit	75,910,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Banten	1 Unit	75,910,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Banten	28 Unit	555,020,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Banten	28 Unit	555,020,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	181 Unit	131,770,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	181 Unit	131,770,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 Gedung	1,772,015,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 Gedung	1,772,015,000	
				7,381,913,000					7,381,913,000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	Provinsi Banten	100	6,518,218,000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	Provinsi Banten	100	6,518,218,000	
	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	Provinsi Banten	100	863,695,000		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	Provinsi Banten	100	863,695,000	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Provinsi Banten	100	6,518,218,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Provinsi Banten	100	6,518,218,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Banten	15 Dokumen	638,846,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi Banten	15 Dokumen	638,846,000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi Banten	192 Dokumen	4,995,952,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi Banten	192 Dokumen	4,995,952,000	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Provinsi Banten	46 Dokumen	182,350,000	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Provinsi Banten	46 Dokumen	182,350,000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Provinsi Banten	85 Dokumen	217,340,000	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Provinsi Banten	85 Dokumen	217,340,000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi Banten	8 Dokumen	483,730,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi Banten	8 Dokumen	483,730,000	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten	100	863,695,000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten	100	863,695,000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Provinsi Banten	4 Dokumen	144,420,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Provinsi Banten	4 Dokumen	144,420,000	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten	10 Dokumen	719,275,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi Banten	10 Dokumen	719,275,000	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten	100	1,493,964,000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten	100	1,493,964,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Provinsi Banten	100	161,177,250	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Provinsi Banten	100	161,177,250	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Provinsi Banten	8 Dokumen	161,177,250	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Provinsi Banten	8 Dokumen	161,177,250	
Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten	100	1,332,786,750	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Provinsi Banten	100	1,332,786,750	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Banten	29 Dokumen	595,275,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Banten	29 Dokumen	595,275,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	1 Dokumen	138,240,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Provinsi Banten	1 Dokumen	138,240,000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi Banten	6 Dokumen	480,731,750	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi Banten	6 Dokumen	480,731,750	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi Banten	1 Dokumen	118,540,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Provinsi Banten	1 Dokumen	118,540,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten bersama dengan para pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum musrenbang tersebut untuk Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat, antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun Tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mendukung misi ke-4 (empat) adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Provinsi Banten adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Adapun Sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mendukung misi ke-4 (empat) adalah :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi”

Maka Sasaran Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan target Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				2023
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
		Nilai Maturitas SPIP	Level	3.1375
3.	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) program antara lain:

- a. Program Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk Kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran.

Secara keseluruhan terdapat 11 (sepuluh) rencana kegiatan untuk anggaran tahun 2023 pada Inspektorat Provinsi Banten antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah;
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Program dan kegiatan pada tahun 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

KODE					URAIAN	DPA 2022	RANCANGAN AWAL RENJA 2023	RANCANGAN AKHIR RENJA 2023	SELISIH
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	59,927,967,000	96,482,400,000	68,528,028,000	27,954,372,000
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,052,090,000	82,880,336,000	58,732,048,000	24,148,288,000
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259,627,000	190,000,000	190,000,000	0
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180,845,000	70,000,000	70,000,000	0
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,600,000	30,000,000	30,000,000	0
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,182,000	90,000,000	90,000,000	0
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43,685,820,000	74,829,150,000	52,077,150,000	22,752,000,000
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43,297,800,000	74,500,000,000	51,748,000,000	22,752,000,000
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	338,550,000	269,150,000	269,150,000	0
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	49,470,000	60,000,000	60,000,000	0

KODE					URAIAN	DPA 2022	RANCANGAN AWAL RENJA 2023	RANCANGAN AKHIR RENJA 2023	SELISIH
01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450,000,000	940,500,000	940,500,000	0
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		198,000,000	198,000,000	0
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450,000,000	742,500,000	742,500,000	0
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,307,195,600	1,824,451,000	1,304,098,000	520,353,000
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107,800,000	107,800,000	107,800,000	0
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348,781,600	345,684,000	345,684,000	0
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	313,714,000	313,714,000	313,714,000	0
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000	671,052,000	350,000,000	321,052,000
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	186,900,000	386,201,000	186,900,000	199,301,000
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166,516,000	450,000,000	517,755,000	-67,755,000
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166,516,000	450,000,000	517,755,000	-67,755,000

KODE					URAIAN	DPA 2022	RANCANGAN AWAL RENJA 2023	RANCANGAN AKHIR RENJA 2023	SELISIH
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50,000,000		50,000,000
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,648,216,400	3,207,265,000	2,817,830,000	389,435,000
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641,462,400	665,462,000	641,462,400	23,999,600
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,006,754,000	2,541,803,000	2,176,367,600	365,435,400
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,534,715,000	1,438,970,000	884,715,000	554,255,000
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,910,000	247,401,000	75,910,000	171,491,000
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555,020,000	446,622,000	555,020,000	-108,398,000
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131,770,000	144,947,000	131,770,000	13,177,000

KODE					URAIAN	DPA 2022	RANCANGAN AWAL RENJA 2023	RANCANGAN AKHIR RENJA 2023	SELISIH
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,772,015,000	600,000,000	122,015,000	477,985,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7,381,913,000	10,926,861,000	8,549,814,750	2,377,046,250
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6,518,218,000	9,044,596,000	7,013,791,750	2,030,804,250
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	638,846,000	515,308,000	612,598,000	-97,290,000
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4,995,952,000	7,053,718,000	5,724,360,000	1,329,358,000
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	182,350,000	313,390,000	291,440,000	21,950,000
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	217,340,000	812,180,000	211,150,000	601,030,000
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	483,730,000	350,000,000	174,243,750	175,756,250
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	863,695,000	1,882,265,000	1,536,023,000	346,242,000
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	144,420,000	152,152,000	152,152,000	0
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	719,275,000	1,730,113,000	1,383,871,000	346,242,000

KODE					URAIAN	DPA 2022	RANCANGAN AWAL RENJA 2023	RANCANGAN AKHIR RENJA 2023	SELISIH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,493,964,000	2,675,203,000	1,246,165,250	1,429,037,750
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	161,177,250	450,000,000	161,177,250	288,822,750
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	161,177,250	450,000,000	161,177,250	288,822,750
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	1,332,786,750	2,225,203,000	1,084,988,000	1,140,215,000
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	595,275,000	1,777,141,000	769,246,000	1,007,895,000
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	138,240,000	84,590,000	38,145,000	46,445,000
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	480,731,750	345,500,000	255,452,000	90,048,000
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	118,540,000	17,972,000	22,145,000	-4,173,000

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Banten

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01				INSPEKTORAT DAERAH					74,700,000,000				68,797,745,000			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					66,096,434,500				64,602,312,000			
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					307,170,000				166,245,000			
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	246,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	50,000,000		
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	17,950,000		
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12,775,000		

6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12,775,000
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12,775,000
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	16 Laporan	100 Persen	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	50,000,000
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	5,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	9,970,000
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					59,981,855,600					61,186,067,000
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	148 Orang/ Bulan	100 Persen	59,614,985,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	60,888,401,000

6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	334,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	248,196,000
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	32,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	49,470,000
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					625,000,000					270,000,000
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	4 Paket	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	0

6	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	30,000,000
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	30 Orang	100 Persen	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen	240,000,000
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,393,383,900					750,000,000
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Paket	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000

6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	3 Paket	100 Persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	200,000,000
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	3 Paket	100 Persen	181,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	150,000,000
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	712,343,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	175,000,000
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	125,000,000
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200,000,000					100,000,000
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Paket	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	0

6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	19 Unit	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,602,255,000					1,650,000,000
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	641,462,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	650,000,000
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	1,960,792,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1,000,000,000
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					986,770,000					480,000,000
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Unit	100 Persen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	80,000,000
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	28 Unit	100 Persen	575,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	200,000,000

6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	181 Unit	100 Persen	131,770,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	1 Unit	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	100,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7,869,552,000					3,412,430,000
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					6,436,580,000					2,462,264,000
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	467,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	579,068,000
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	5,028,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	1,000,000,000

6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	281,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	168,350,000
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	559,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	217,340,000
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Kesepakatan	n100 Persen	27,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	13,776,000
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	72,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	483,730,000
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					1,432,972,000					950,166,000

6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	733,422,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	153,720,000
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 Persen	699,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	80 Persen 100 Persen	796,446,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					734,013,500					783,003,000
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan					137,756,000					161,177,250
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	4 Rekomenda	100 Persen	137,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	161,177,250
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi					596,257,500					621,825,750
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	12 Perangkat Daerah	100 Persen	164,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	138,240,000
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	5 Kegiatan	100 Persen	431,287,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	483,585,750
TOTAL										74,700,000,000					68,797,745,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten berpedomanan pada nomenlatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (ItermEDIATE Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
INSPEKTORAT DAERAH					68,528,028,000	Inspektorat
Tujuan PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Sasaran PD : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP 77.92	Nilai SAKIP 70-80	58,732,048,000	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			307,170,000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	246,200,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokumen	12,200,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokumen	12,200,000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	12,900,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Dokumen	12,900,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16 Laporan	4,800,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	5,970,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59,981,855,600	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		148 org/bulan	59,614,985,600	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	334,470,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		12 laporan	32,400,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			625,000,000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		4 paket	200,000,000	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 dokumen	200,000,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30 orang	225,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1393383900	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 paket	100000000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3 paket	300000000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3 paket	181040000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	712343900	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 laporan	186,900,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			517,755,000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		70 unit	517,755,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4 unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,817,830,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	641,462,400	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	2,176,367,600	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			884,715,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	75,910,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		28 unit	555,020,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		181 unit	131,770,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 paket	122,015,000	
Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Sasaran PD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 3	8,549,814,750	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	dan Pelayanan Publik			SAKIP Komponen Penilaian Internal nilai 14		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			7,013,791,750	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		2 laporan	612,598,000	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		2 laporan	5,724,360,000	
		Reviu Laporan Kinerja		2 laporan	291,440,000	
		Reviu Laporan Keuangan		2 laporan	211,150,000	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 laporan	174,243,750	
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			1,536,023,000	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		2 laporan	152,152,000	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		2 laporan	1,383,871,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD
				Target	Pagu Indikatif	
	Sasaran PD : Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas APIP level 3	1 unit kerja Zona Integritas	1,246,165,250	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			161,177,250	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		2 laporan	161,177,250	
		Pendampingan dan Asistensi			1,084,988,000	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		2 laporan	769,246,000	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		2 laporan	38,145,000	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 laporan	255,452,000	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		2 laporan	22,145,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) Program antara lain :

- a. Program Penunjang Umum Pemerintah Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan Pemdampingan dan Asistensi

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 11 (Sebelas) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

- a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.
- c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.

- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
- e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Serang, Juli 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001